



BPK Perwakilan Provinsi Jateng Serahkan LHP atas LKPD TA 2021 kepada 11 Pemerintah Daerah

Semarang, Senin (23/05/22) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelas pemerintah kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2021 dari sebelas pemerintah daerah (pemda) tersebut diserahkan langsung oleh **Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali** kepada ketua DPRD dan kepala daerah dari masing-masing pemda. Digelar di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada sebelas pemda tersebut. Kesebelas pemda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, Pemkab Purbalingga, Pemkab Pati, Pemkab Kudus, Pemkab Magelang, Pemkab Wonosobo, Pemkab Brebes, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Pemkot Semarang, Pemkab Pekalongan, dan Pemkab Jepara.

Saat memberikan sambutannya, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali menyampaikan ucapan selamat kepada sebelas pemda yang memperoleh opini WTP dan berharap hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. "Mari kita bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujarnya. Ayub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemda yang telah mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2021.

Dalam hal pemeriksaan LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam dua buah buku. **Buku I** memuat opini atas laporan keuangan dan **Buku II** memuat temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meski memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Masalah tersebut antara lain panatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai, kekurangan volume pekerjaan fisik, dan penatausahaan pendapatan retribusi yang tidak tertib.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Jateng telah menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Mei 2021. BPK Jateng juga telah menyerahkan LHP atas LKPD 13 pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam 6 tahap acara penyerahan. Masing-masing pemda tersebut memperoleh opini WTP.

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Fax. 024-8660884
Email : humas.jateng@bpk.go.id